

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta pembahasan hasil data wawancara dan observasi yang telah peneliti laksanakan di SMA Negeri 3, SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 7 Sarolangun bersama dengan 6 orang partisipan terkait dengan Peranan kompetensi professional guru Bimbingan dan Konseling dalam implementasi Kurikulum merdeka program sekolah penggerak di SMA Negeri di Kabupaten Sarolangun sebagai berikut :

1. Implementasi Kurikulum merdeka pada sekolah penggerak di 3 Sekolah di Sarolangun yakni SMA Negeri 3, SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 7 berjalan sudah cukup optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan: a) Penetapan tujuan, b) Pengumpulan data, c) Dokumentasi dan pemantauan, d) Kolaborasi dengan guru bidang studi lain juga dengan kepala sekolah dan perangkatnya, e) Kontribusi yang aktif, f) Guru Bimbingan dan Konseling sebagai Koordinator dalam menyelesaikan masalah anak di sekolah.
2. Peranan kompetensi profesional guru Bimbingan dan Konseling dalam implementasi Kurikulum merdeka jenjang SMA di sekolah penggerak yakni: a) Guru Bimbingan dan Konseling mulai dari melakukan assesment diagnosis di awal tahun ajaran untuk melihat kesiapan peserta didik baik secara fisik maupun psikis, b) Guru Bimbingan dan Konseling di dalam implementasi Kurikulum merdeka mulai dari

menyesuaikan diri, bakat dan minat peserta didik untuk dikembangkan, c) Guru Bimbingan dan Konseling selalu berkewajiban untuk mengembangkan karakter siswa dan bisa mengembangkan integritas siswa, d) Koordinasi dengan guru bidang studi lain juga dengan kepala sekolah dan perangkat sekolah, e) Guru Bimbingan dan Konseling menuntun kepribadian anak dan Kerjasama anak serta membimbing anak secara akademik begitu juga pada keterampilan anak.

3. Faktor pendukung dan penghambat dari Peranan Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling dalam Impelementasi Kurikulum Merdeka Jenjang SMA Sekolah Penggerak dimulai dari faktor pendukungnya adalah : a) Dukungan Kepala Sekolah, b) SDM yang memadai c) Fasilitas dan teknologi memadai, d) Pendampingan dari fasilitator kemendikbud, e) Dukungan dan support dari orang tua. Sedangkan faktor penghambat diantaranya adalah : a) Kurang koordinasi dari para elemen sekolah, b) kurangnya motivasi untuk terus bergerak maju, c) Keterbatasan waktu di sekolah, d) Jam mengajar yang full sehingga harus menyesuaikan waktu Kembali, e) Belum maksimal peningkatan kompetensi untuk guru Bimbingan dan Konseling itu sendiri, f) Kurangnya waktu pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka

5.2. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti menyarankan beberapa poin saran yang perlu sebagai berikut :

1. Implementasi Kurikulum merdeka pada sekolah penggerak di 3 Sekolah di Sarolangun, diharapkan semua stake holder dapat berperan aktif untuk memajukan atau mensukseskan program sekolah Penggerak melalui Kurikulum Merdeka, Kepada guru Bimbingan dan Konseling sebagai bagian dari satuan Pendidikan agar lebih meningkatkan lagi kualitas dan kompetensi profesional seorang guru Bimbingan dan Konseling agar implementasi Kurikulum merdeka di sekolah penggerak dapat terlaksana dengan baik.
2. Peranan kompetensi profesional guru Bimbingan dan Konseling dalam implementasi Kurikulum merdeka jenjang SMA di sekolah penggerak diharapkan Kepala sekolah kepala sekolah sebagai penanggung jawab agar dapat lebih mengoptimalkan peran guru Bimbingan dan Konseling dalam implementasi Kurikulum merdeka di sekolah penggerak, Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat membantu pihak sekolah dan kepala sekolah agar lebih menerapkan peran guru bimbingan konseling di sekolah dalam implementasi Kurikulum merdeka di sekolah penggerak.
3. Faktor pendukung dan penghambat dari Peranan Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling dalam Impelementasi Kurikulum Merdeka Jenjang SMA Sekolah Penggerak

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat membantu pihak sekolah dan kepala sekolah dapat mengatasi Faktor penghambat yang terjadi dan mengoptimalkan kelebihan yang dimiliki oleh setiap sekolah untuk dikembangkan dan itu akan menjadi program unggulan yang bisa dilaksanakan di satuan Pendidikan.